

ARRANGING POLICY ORCHESTRATION TO ACCELERATE DIGITALIZATION IN TRADE

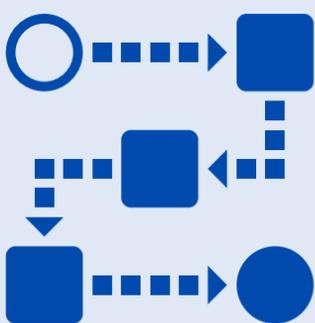
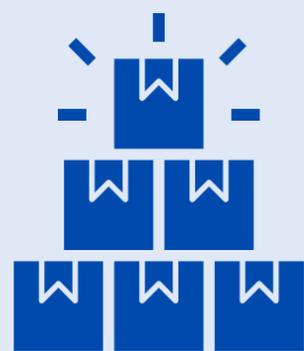
Tawaran rekomendasi kebijakan yang dimotori oleh Kementerian Perdagangan menjadi poin esensial untuk mendukung akselerasi digitalisasi perdagangan, khususnya di pasar rakyat. Efektivitas kebijakan ini membutuhkan orkestrasi kebijakan yang melibatkan peran kementerian/lembaga lain sehingga output dan outcome-nya menjadi maksimal.

LATAR BELAKANG DAN DESKRIPSI MASALAH



Adopsi teknologi informasi yang masif di tengah keterbatasan mobilitas dan interaksi fisik di masa pandemi Covid-19 menjadi momentum percepatan digitalisasi perdagangan di Indonesia. Di antara berbagai bidang yang mengaplikasikan digitalisasi perdagangan, *e-commerce* (lokapasar) muncul sebagai *leading sector* yang menstimulasi dan sekaligus menghela transformasi digital perdagangan di Indonesia pada saat ini dan nanti.

Saat ini pelaku lokapasar lebih banyak memfasilitasi transaksi jual beli yang melibatkan barang akhir (*final goods*) terutama yang berasal dari impor.



Digitalisasi perdagangan masih lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi pada sisi hilir dibandingkan sisi hulu (produksi) sehingga produktivitas pada tingkat produsen relatif stagnan.

Rendahnya daya saing beberapa produk Indonesia dan pandemi Covid-19 yang memperburuk *Global Value Chain* (GVC) akibat banyaknya negara melakukan *inward looking orientation*.



Pasar rakyat belum memanfaatkan digitalisasi perdagangan secara optimal.

KUTIPAN PAKAR

Hendri Saparini, Ph. D



"Untuk meningkatkan pangsa pasar produk lokal dalam *e-commerce* diperlukan seperangkat kebijakan yang komprehensif untuk menciptakan produk dalam negeri yang berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, antara lain insentif fiskal, peningkatan daya saing UMKM, riset pasar, adopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas, proses produksi, strategi rantai pasok, dan lain sebagainya".

Agung Bezharie

"*E-commerce* adalah lokomotif digitalisasi dan tidak akan mematikan perdagangan fisik karena penetrasinya masih kurang dari satu persen. Justru *omnichannel* atau multi saluran yang ada saat ini memungkinkan masyarakat berbelanja dimana saja dan salah satu saluran yang harus di-*enable* adalah ritel tradisional".



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1 Membangun ekosistem perdagangan digital yang mampu memfasilitasi transaksi perdagangan digital dengan biaya terjangkau dan handal.



Melindungi konsumen dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha khususnya UMKM untuk maju.

Menjaga persaingan sehat antar penyedia *platform* dan *enabler*.



Memperkuat keamanan siber.

2 Meningkatkan penguasaan pasar produk-produk lokal di platform lokapasar.

Kementerian Perdagangan dapat mengatur produk-produk yang boleh diimpor secara ritel/grosir melalui lokapasar yang saat ini diakses oleh masyarakat Indonesia.



Peningkatan kualitas produk lokal agar dapat berkompetisi di pasar domestik dan internasional.

3 Pembangunan infrastruktur *big data* untuk transaksi perdagangan digital secara nasional dan pengelolaan *big data*.

Mendorong segera pelaksanaan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk mendapatkan basis data yang memadai dalam rangka mendukung pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengembangan digitalisasi.



Menciptakan basis data yang mampu menelusuri perjalanan suatu produk dari hulu, hilir, hingga konsumen.

Memadukan data pasokan dengan data investasi untuk mendukung penyerapan dan membuka peluang bisnis.



Pemantauan ketersediaan barang antarwilayah untuk pengendalian inflasi regional.

Penguatan sistem logistik nasional dengan insentif dan fasilitasi investasi dalam bidang distribusi yang memanfaatkan teknologi logistik digital—khususnya *cold-chain*.



4 Mendukung daya saing ekonomi di tingkat domestik maupun global melalui pengembangan kapasitas dan literasi digital Sumber Daya Manusia (SDM).

Pemberian asistensi dalam peningkatan keahlian digital sebagai bekal bagi UMKM dalam memasuki era digital.



Pembaharuan kurikulum pendidikan digital, peningkatan keterampilan digital bagi tenaga kerja, serta insentif adopsi teknologi.

Pematangan rencana dan aksi untuk menjaga keberlanjutan dalam jangka panjang untuk Program Pendamping Pedagang dan/atau Pengelola Pasar Rakyat seperti Penggerak Muda Pasar Rakyat.



5 Mempercepat digitalisasi pasar rakyat.

Mengembangkan *pilot project* pasar rakyat yang terdigitalisasi penuh (*cashless, digital journal, digital sales ID, digital supply ID, penerapan peduli lindungi, e-retribusi, e-registrasi, website pasar, e-monitoring harga, e-complain*).



Kampanye informasi yang masif dan intensif terkait *benefit* bagi para pedagang dan juga *supplier* pasar yang tergabung dalam lokapasar.

*Disclaimer:

Trade Policy Advisory Group (Trade-PAG) merupakan forum kolaborasi antara Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), ERIA, dan ITAPS IPB yang bertujuan memberikan saran kebijakan kepada Menteri Perdagangan terkait isu terkini dan isu strategis di bidang perdagangan. Dokumen ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada laporan ini. Hak cipta Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.